

Peta Inarisk Kawasan Longsor

Udrekh

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana

Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana

Gambaran Umum **InaRISK**

how risky is your place?

- **InaRISK (web)** adalah **portal** hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik (Rp.), potensi kerugian ekonomi (Rp.) dan potensi kerusakan lingkungan (ha) dan terintegrasi dengan berbagai data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.
- **InaRISK Personal (Apps)** adalah sebuah **tools/aplikasi** berbasis smartphone untuk memberikan informasi ancaman bencana disuatu lokasi berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang dilengkapi dengan edukasi untuk upaya antisipasinya.



**Telah ditambahkan berbagai Fitur lain
untuk mendukung upaya Penanggulangan Bencana**

inaRISK

how risky is your place?

- InaRISK: Sistem informasi Risiko Bencana.
- InaRISK: berisikan Peta Risiko Bencana.
- InaRISK: berbentuk **WEB** dan **Aplikasi HP**.

Berbasis WEB
&
SmartPhone



<https://inarisk.bnpb.go.id>



@inaRISK

inaRISK

inarisk.bnpb.go.id

KETAHUI RISIKO DAERAH ANDA!

Inarisk merupakan sebuah sistem informasi online berbasis GIS services yang dapat menampilkan kajian risiko bencana (bahaya, kapasitas, kerentanan, dan risiko) dan monitoring penurunan indeks risiko bencana diseluruh Indonesia. Dalam pemanfaatannya, Inarisk dapat berfungsi sebagai referensi dalam perencanaan daerah dan memproyeksikan kerugian akibat bencana.



**INARISK PERSONAL
(MOBILE APPS)**

**KETAHUI ANCAMAN DITEMPAT ANDA
IKUTI PETUNJUK REKOMENDASI
LINDUNGI DIRI DAN KELUARGA
DARI ANCAMAN BENCANA!**

DOWNLOAD

1. Scan the QR Code
2. <http://inarisk.bnpb.go.id/apps/inarisk.apk>



© BNPB, 2017

inaRISK WEB

how risky is your place?

<https://inarisk.bnpb.go.id>

- Ditujukan untuk Pemerintah, perencana, akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat
- informasi hasil kajian risiko bencana berupa ancaman bencana, kerentanan (populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan), kapasitas, dan risiko bencana.



Identifikasi sebaran risiko bencana yang dikaitkan dengan kepentingan lain

Dilengkapi dengan *Dashboard* untuk berbagai kebutuhan, termasuk **Pemantauan** beberapa aktivitas pengurangan risiko bencana

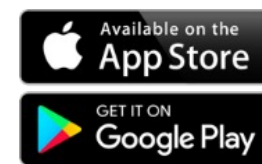
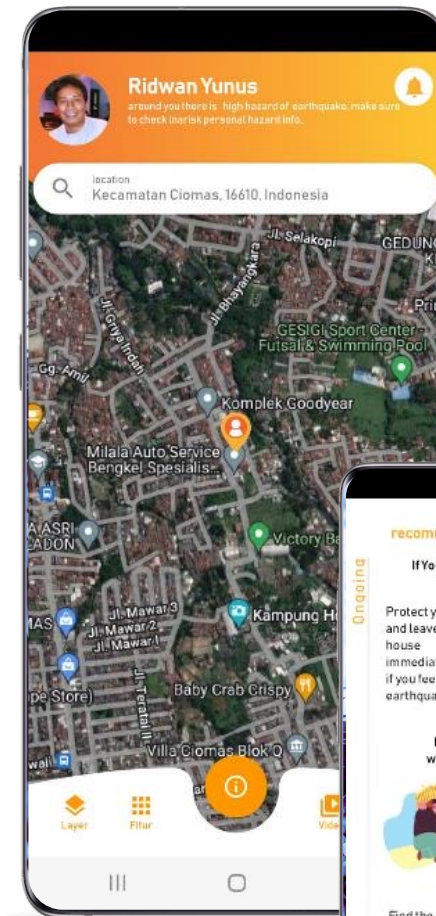
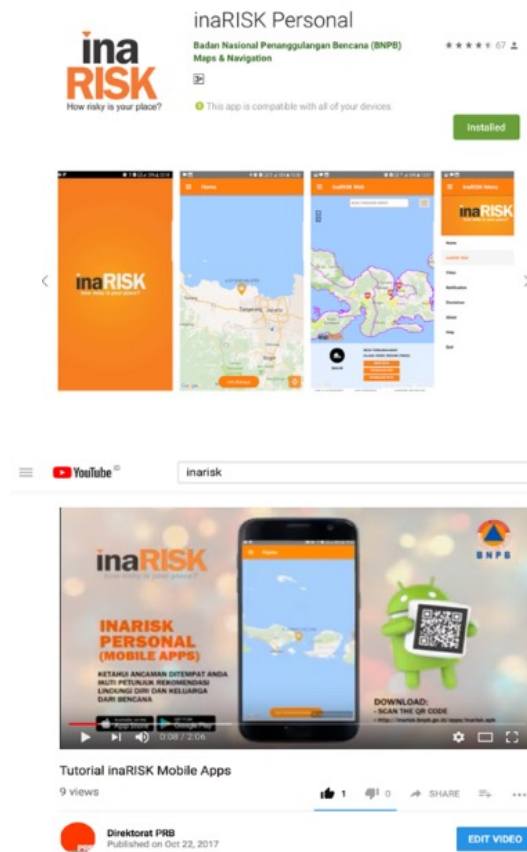
inaRISK Personal

how risky is your place?

- Ditujukan untuk masyarakat
- Identifikasi tingkat bahaya berdasarkan lokasi (koordinat)
- Rekomendasi aksi antisipasi untuk individu

Identifikasi tingkat Bahaya
Untuk setiap titik di Indonesia

Dilengkapi dengan *Fitur* untuk
berbagai kebutuhan, termasuk
**PELAPORAN KEGIATAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA**



MENGAPA KAJIAN RISIKO?

- UU 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana: Perencanaan Penanggulangan Bencana
 - Pasal 36 (3):
 - Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- PP 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
 - Pasal 6:
 - (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
 - (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana
 - Pasal 8
 - (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana
 - (7) Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan

KEBUTUHAN KAJIAN RISIKO

- Untuk formulasi RPB (Nasional/Provinsi/Kabupaten)
- Untuk formulasi RAN-PRB (dan RAD-PRB)
- Untuk Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
- Untuk Rencana Kontijensi
- Rencana Operasi Darurat
- Rencana Pemulihan
- Rencana Kesiapsiagaan Masyarakat

Gambaran Umum Tanah Longsor di Indonesia Berdasarkan Inarisk

Bahaya

- Luas bahaya sedang – tinggi: 79.521.265 Ha



Kerentanan

- Luas kerentanan sedang : 824.785 Ha
- Luas kerentanan tinggi : 922.240 Ha



Kapasitas

- Kapasitas tinggi : 28 kabupaten/kota
- Kapasitas sedang : 210 kabupaten/kota
- Kapasitas rendah : 226 kabupaten/kota

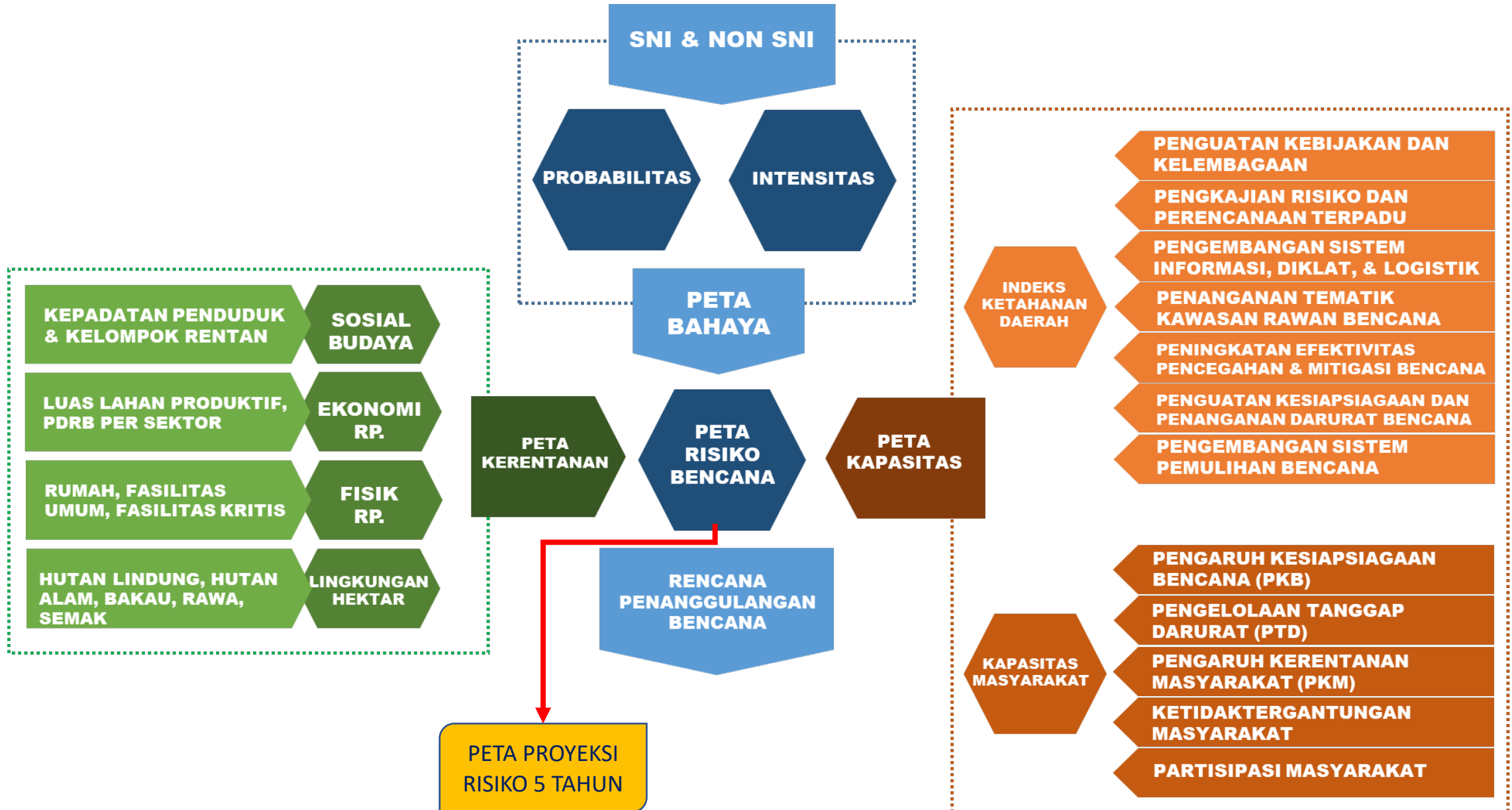


Risiko

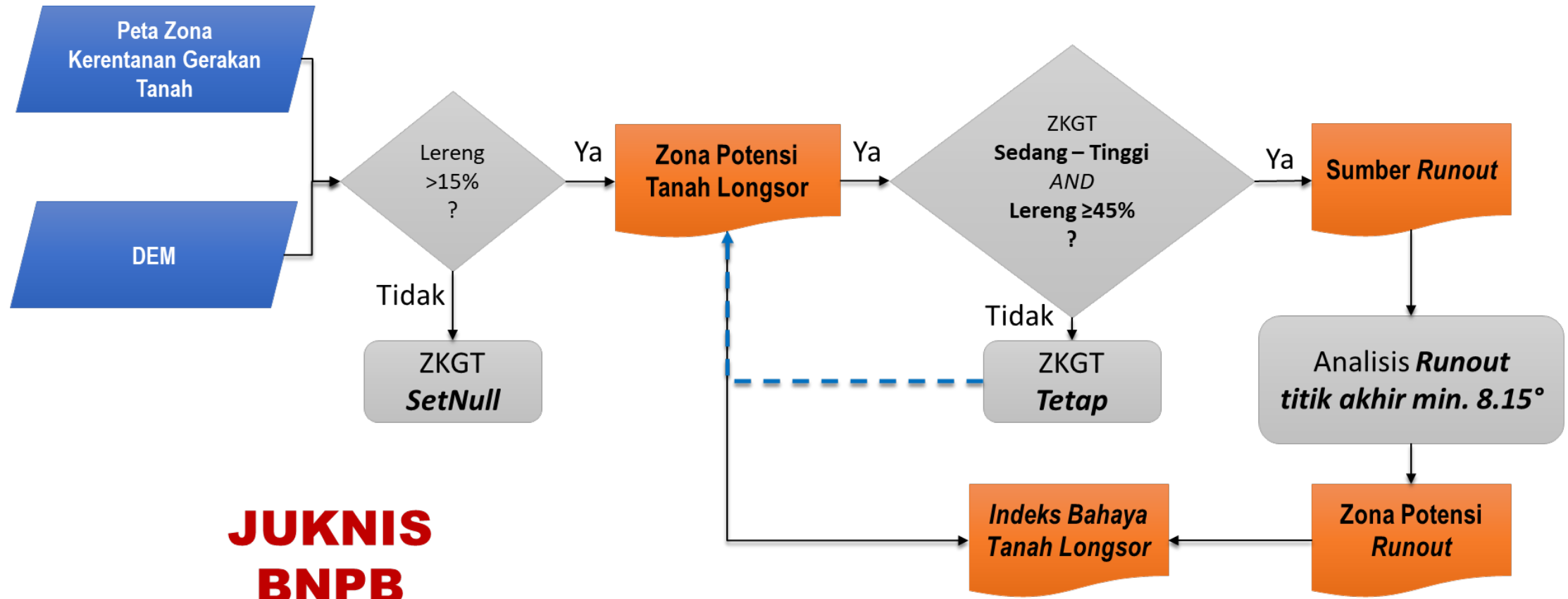
- Luas risiko: 79.521.265 Ha
- Jiwa terpapar: 20.736.093 jiwa
- Fisik (Rp Miliar): 180.831.930
- Ekonomi (Rp Miliar): 515.194.074
- Lingkungan: 7.685.637 Ha



METODE PENYUSUNAN



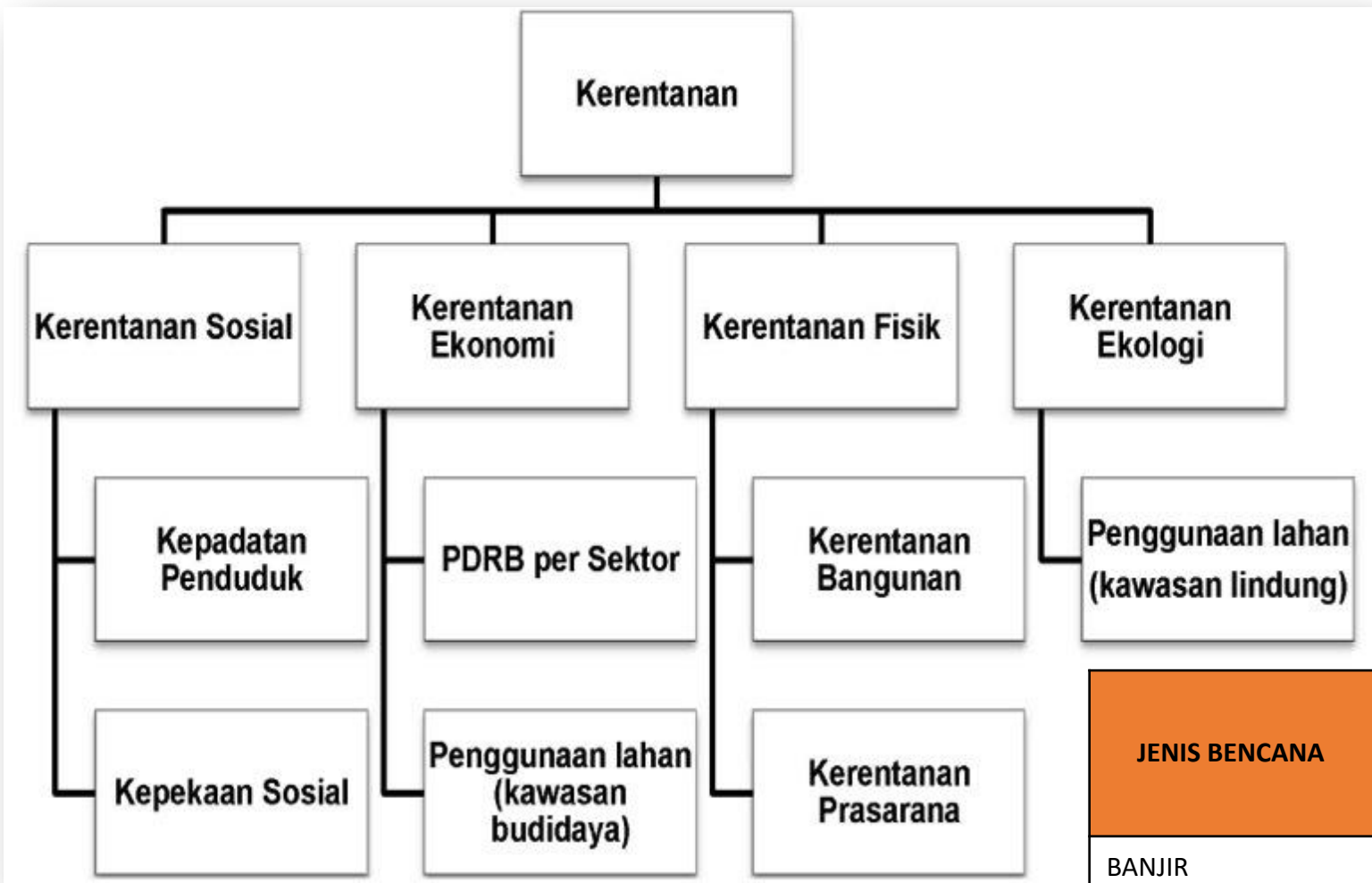
METODE BAHAYA Tanah Longsor



**JUKNIS
BNPB**

SUMBER: DIT. PERB BNPB

KOMPONEN INDEKS KERENTANAN



JENIS BENCANA	BOBOT PARAMETER KERENTANAN (PENENTUAN INDEKS KERENTANAN)			
	SOSIAL	FISIK	EKONOMI	LINGKUNGAN
BANJIR	50%	35%	10%	5%
TANAH LONGSOR	50%	35%	10%	5%
BANJIR BANDANG	50%	35%	10%	5%

METODE KAPASITAS

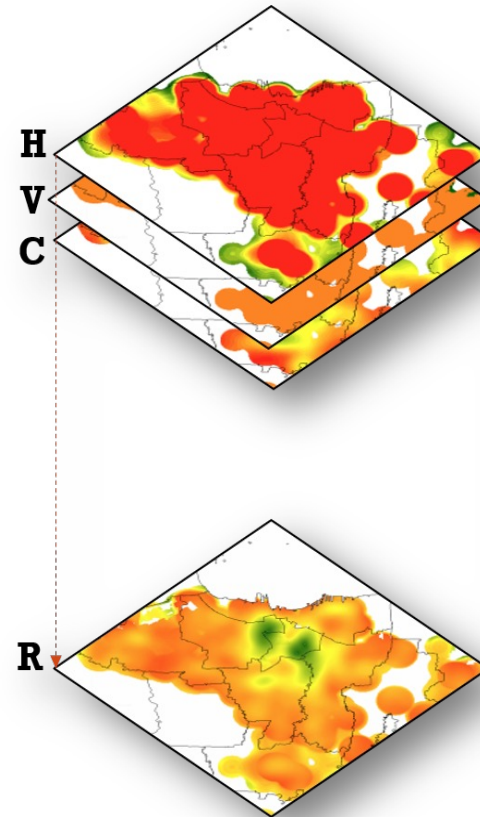
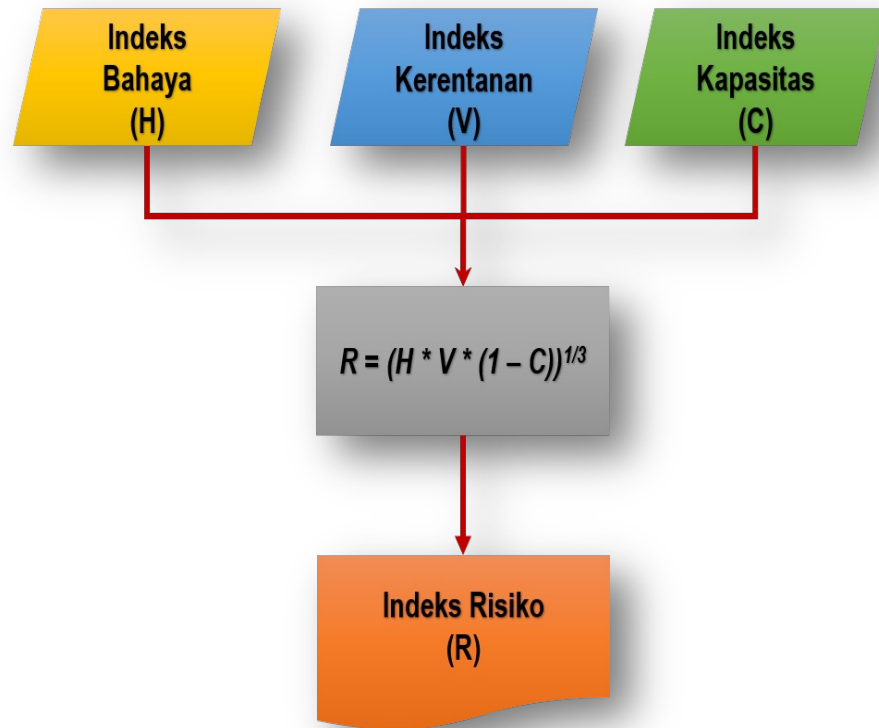
Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1)
Ketahanan Daerah	40	Transformasi nilai 0 - 0.40	Transformasi nilai 0.41 - 0.80	Transformasi nilai 0.81 - 1
Kesiapsiagaan Masyarakat	60	<0.333	0.334-0.666	0.667-1

$$\text{Jika } IKD \leq 0.4, IKDT = 1/3 \cdot 0.4 \cdot IKD$$

$$\text{Jika } 0.4 < IKD \leq 0.8, IKDT = 1/3 + (1/3 \cdot 0.4 \cdot (IKD - 0.4))$$

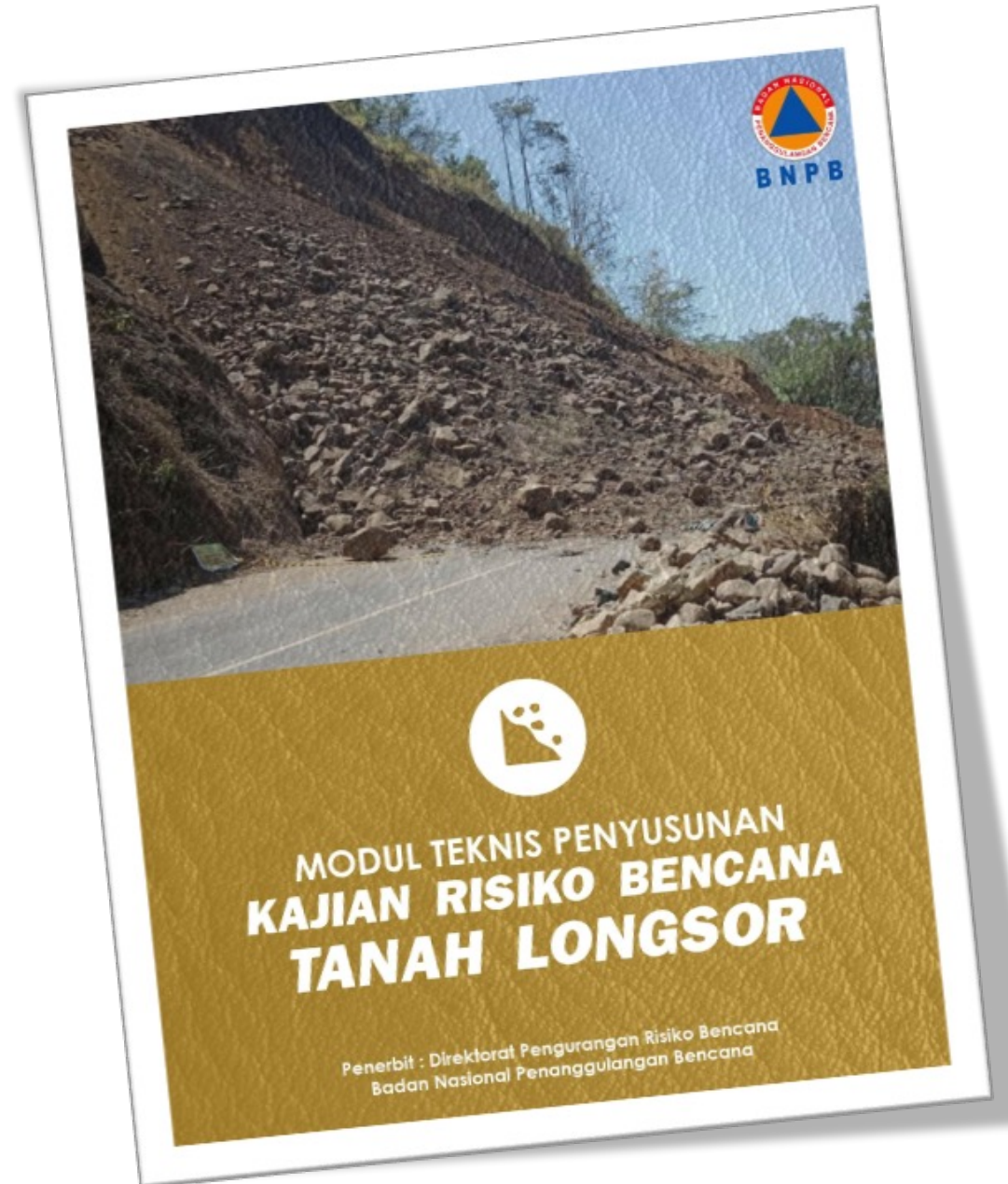
$$\text{Jika } 0.8 < IKD \leq 1, IKDT = 2/3 + (1/3 \cdot 0.2 \cdot (IKD - 0.8))$$

METODE RISIKO



$$\bullet R = (H \times V \times (1 - C))^{1/3}$$

JUKNIS KRB Tanah Longsor



Contoh Penanganan Berbasis DAS



KOMITMEN BERSAMA

PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan komitmen untuk:

1. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan penanggulangan banjir dan longsor dalam dokumen perencanaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan menyediakan alokasi anggaran yang dituangkan dalam rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur 2020 – 2024, secara antisipatif ataupun kontinuitif dalam dokumen perencanaan yang sesuai kebutuhan penataan ruang kawasan yang dituangkan di dalam Rekapitulasi Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor Di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020 – 2024;
3. Rekapitulasi Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor Di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pernyataan Bersama ini;
4. Melakukan koordinasi dan penataan kelembagaan penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur secara terpadu dengan dukungan peningkatan kapasitas dan peran aktif Aparat Keamanan/ Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat;
5. Melakukan penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur dari kawasan hulu, tengah dan hilir secara terpadu dengan berpedoman pada "Quick Wins": Pengurangan risiko Banjir dan Longsor, Penataan Ruang dan Bangunan, Pembangunan Infrastruktur Drainase, Pengendalian Penurunan Tanah, Penyediaan Sistem Peringatan Dini, Penguatan Manajemen Krisis dan Peningkatan Tata Kelola Regulasi dan Kelembagaan;
6. Mewujudkan penegakan hukum secara tegas atas pelaksanaan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur;
7. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pengawasan penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur secara konsisten, terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Jakarta, 02 Juni 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI

(MUHAMMAD TITO KARNAVIAN)

MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS

(SUHARSO MONOARFA)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(M. BASUKI HADIMULJONO)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN

(SOFYAN A. DJALIL)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(SITI NURBAYA)

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(DONI MONARDO)

GOVERNUR JAWA BARAT

(MOCHAMAD RIDWAN KAMIL)

GOVERNUR DKI JAKARTA

(ANIES BASWEDAN)

GOVERNUR BANTEN

(WAHIDIN HALIM)

BUPATI BOGOR BUPATI TANGERANG BUPATI BEKASI PIt. BUPATI CIANJUR WALIKOTA BOGOR WALIKOTA BEKASI WALIKOTA TANGERANG SELATAN WALIKOTA TANGERANG WALIKOTA DEPOK

(ADE YASIN) (A. ZAKI ISKANDAR) (EKA SUPRIA ATMAJA) (H. HERMAN SUHERMAN) (BIMA ARYA) (RAHMAT EFFENDI) (AIRIN RACHMI DIANY) (H. ARIEF R. WISMANSYAH) (KH. MOH. IDRIS)



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR 2020-2024												
NO.	STRATEGI	QUICK WINS	KEGIATAN	LOKASI	TAHUN					BIAYA INDIKATIF	TANGGUNGJAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024			
			6	Pemenuhan DED Diakses Pemukiman di Metropolitan Bodebekpunjur	- Harjam, Kec. Bogor Selatan - Lak, Kec. Bogor Barat - Alang Serjeng, Kec. Kemang - Bakamari, Kec. Jember - Jatras, Kec. Jember - Bakamari, Kec. Jember - Kota Baru, Kec. Bekasi Barat - Ari Jaya, Kec. Bekasi Timur - Tanjung Mekar, Kec. Karawang - Bant, Kec. Bandung - Cikao Bandung, Kec. Babakan - Cikao Bandung, Kec. Babakan - Cikao Bandung, Kec. Babakan - Cikao Bandung, Kec. Babakan - Cikao Bandung, Kec. Babakan						11.200.000.000	Provinsi Jawa Barat
			7	Pemenuhan Perpres penanggulangan banjir dan longsor jabodetabekpunjur	Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Di Kawasan jabodetabekpunjur						4.000.000.000	Kementerian Dalam Negeri
			8	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah	Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Di Kawasan jabodetabekpunjur						2.000.000.000	Kementerian Dalam Negeri
			9	Membedakan dan evaluasi perencanaan banjir di daerah	Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Di Kawasan jabodetabekpunjur						2.000.000.000	Kementerian Dalam Negeri
2	Menegakkan dan Mengurangi Risiko	Penataan Ruang dan Bangunan	1	Kajian Pemetaan dan analisis risiko bencana	Pusat						6.000.000.000	BPNP
1	Keterpaduan	Penataan dan Pemukiman	1									



Kerja Sama Antar Kementerian untuk Cegah Banjir dan Tanah Longsor di Jabodetabekpunjur



KOMITMEN BERSAMA STAKEHOLDER TERKAIT PADA RENAKSI 2020-2024

Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Jabodetabek

Kamis, 2 Januari 2020 03:24 WIB

Dilihat 856 kali

BAGIKAN



RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR DI KAWASAN JABODETABEPUNJUR 2020-2024

NO.	STRATEGI	QUICK WINS	KEGIATAN	LOKASI	TAHUN					BIAYA INDIKATIF	TANGGUNGJAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024		
6			Penyusunan DED Drainase Permukiman di Metropolitan Bodebekkarpu	- Harjasari, Kec. Bogor Selatan - Loli, Kec. Bogor Barat - Atang Serjaya, Kec. Kemang - Sukamahal, Kec. Jonggol - Jatirasa, Kec. Jatiarah - Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat - Kota Baru, Kec. Bekasi Barat - Anon Jaya, Kec. Bekasi Timur - Tanjung Makar, Kec. Karawang Barat - Cikao Bandung, Kec. Babakan Cikao - Cicinde Utara, Kec. Banyuwari - Pabuaran, Kec. Bojong Gede - Cibuluh, Kec. Bogor Utara				✓	✓	11.200.000.000	Provinsi Jawa Barat
7			Penyusunan Perpres penanggulangan banjir dan longsor jabodetabekpunjur	Seluruh Provinsi dan Kab/Kota Di Kawasan Jabodetabekpunjur		✓	✓			4.000.000.000	Kementerian Dalam Negeri
8			Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah	Seluruh Provinsi dan Kab/Kota Di Kawasan Jabodetabekpunjur		✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	Kementerian Dalam Negeri
9			Monitoring dan evaluasi penanggulangan banjir di daerah	Seluruh Provinsi dan Kab/Kota Di Kawasan Jabodetabekpunjur		✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	Kementerian Dalam Negeri
2	Mencegah dan Mengurangi Risiko	Penataan Ruang dan Bangunan	1 Kajian Pemetaan dan analisa risiko bencana	Pusat		✓	✓	✓	✓	6.000.000.000	BNPB

LAMPIRAN KOMITMEN BERSAMA PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR KAWASAN JABODETABEPUNJUR
REKAPITULASI RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR DI KAWASAN JABODETABEPUNJUR 2020 - 2024

NO.	STRATEGI	QUICK WINS	JUMLAH KEGIATAN	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB	BIAYA INDIKATIF
III. PENANGGULANGAN HILIR						
1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Regulasi dan Kelembagaan	51	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Depok	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Kota Tangerang Selatan	448.362.183.192
2	Mencegah dan Mengurangi Risiko	Penataan Ruang dan Bangunan	8	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BNPB, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat	1.651.973.144.174
		Pengurangan Bahaya	28	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan	3.997.419.150.776
3	Mengendalikan dan Melindungi	Pembangunan Infrastruktur**	129	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang	15.239.649.074.983
		Pengendalian Penurunan Tanah	5	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Kementerian PUPR, Provinsi DKI Jakarta	585.893.336.713
4	Meningkatkan Kesiapsiagaan	Penguatan Manajemen Krisis	22	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BNPB, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan	209.792.536.080
		Peringatan Dini Banjir	6	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten	BNPB, Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan	16.442.245.150
SUBTOTAL KEGIATAN			249	SUBTOTAL BIAYA INDIKATIF		22.129.532.271.068
TOTAL KEGIATAN			584	TOTAL BIAYA INDIKATIF		35.987.174.723.930*

*): Kegiatan dan pagu anggaran masih bersifat indikatif

**): Pemerintah Daerah agar menertibkan daerah sempadan sungai/pengaliran tanah/pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Jakarta, 02 Juni 2020

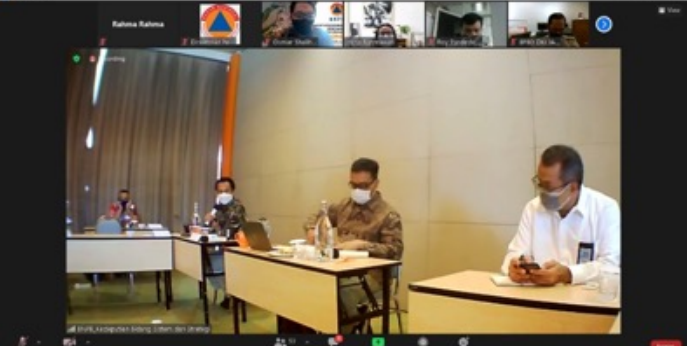
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI		MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS	MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN		MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(MUHAMMAD TITO KARNAVIAN)		(SUHARSO MONORFA)	(M. BASUKI HADIMULJONO)		(SOFYAN A. DJALIL)		(SITI NURBAYA)		(DONI MONARDO)
GUBERNUR JAWA BARAT			GUBERNUR DKI JAKARTA			GUBERNUR BANTEN			
(MOHAMAD RIOWAN KAMIL)			(ANIES BASWEDAN)			(WAHIDIN HALIM)			
BUPATI BOGOR	BUPATI TANGERANG	BUPATI BEKASI	PR. BUPATI CIANJUR	WALIKOTA BOGOR	WALIKOTA BEKASI	WALIKOTA TANGERANG SELATAN	WALIKOTA TANGERANG	WALIKOTA DEPOK	
(ADE YASIN)	(A. ZAKI ISKANDAR)	(EKA SUPRIA ATMAJA)	(H. HERMAN SUHERMAN)	(BIMA ARYA)	(RAHMAT EFFENDI)	(ARIN RACHMI DANY)	(H. ARIEF R. WISMANSYAH)	(KH. MOH. IDRIS)	

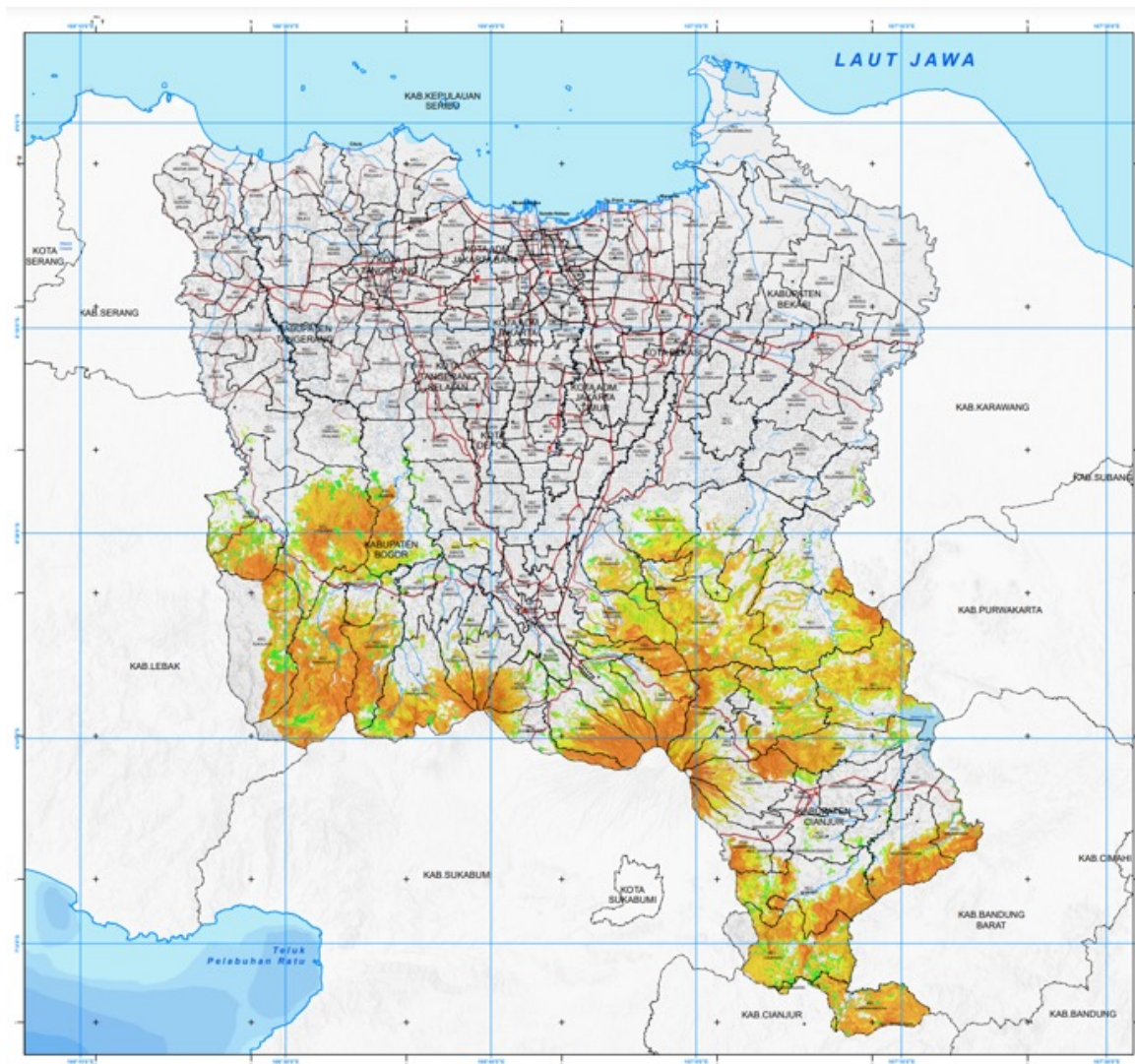


Berseri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2E sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



Kajian dan Pemetaan dan Analisa Risiko menjadi salah satu komitmen dan aksi BNPB. BNPB telah menyusun pada T.A 2021.

PETA RISIKO LONGSOR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR



Tabel 3.99. Perbandingan Bahaya Tanah Longsor Eksisting dengan Proyeksi

KABUPATEN/KOTA	EKSISTING			PROYEKSI		
	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	Kelas	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	Kelas
Bekasi	353.25	5	Tinggi	367.02	6	Tinggi
Bogor	129,282.39	317	Tinggi	129,652.20	342	Tinggi
Cianjur	72,477.81	160	Tinggi	72,506.70	163	Tinggi
Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	-	-	-	22.14	2	Tinggi
Kota Bogor	345.15	13	Tinggi	407.79	21	Tinggi
Kota Depok	-	-	-	21.42	2	Tinggi
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	31.14	3	-
JABODETABEKPUNJUR	202,458.60	495	Tinggi	203,008.41	539	Tinggi

Tabel 3.100. Perbandingan Bahaya Tanah Longsor Eksisting dengan Proyeksi Berdasarkan DAS

DAS/SUB DAS	EKSISTING			PROYEKSI		
	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	KELAS	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	KELAS
CIDURIAN	19,187.19	43	Tinggi	19,271.43	46	Tinggi
CILELEUS	-	-	-	-	-	-
CILIWUNG	10,544.40	41	Tinggi	10,601.37	50	Tinggi
CIMANCEURI	5,672.07	16	Tinggi	5,811.93	24	Tinggi
CIPASILIAN	-	-	-	-	-	-
CIRARAB	-	-	-	-	-	-
CISADANE	53,608.95	158	Tinggi	53,704.44	167	Tinggi
CITARUM	96,920.01	188	Tinggi	96,948.90	191	Tinggi
K. ANGKE PESANGGRAHAN	-	-	-	0.27	1	Rendah
K. BEKASI	16,521.12	34	Tinggi	16,665.21	45	Tinggi
K. BUARAN	-	-	-	-	-	-
K. CAKUNG	-	-	-	-	-	-
K. KRUKUT	-	-	-	-	-	-
K. SUNTER	-	-	-	-	-	-
Sub Das Lainnya	4.86	15	Tinggi	4.86	15	Tinggi
JABODETABEKPUNJUR	202,458.60	495	Tinggi	203,008.41	539	Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan pengkajian risiko , 2021

TERIMA KASIH

“innovative approaches including trans-boundary governance that not only consider ecosystem-based approach but also oriented on socio-culture and welfare aspects of community at risks. This is followed by building Indonesia's political will to adopt systemic risk governance framework by considering suitability and needs of government authorities and community at risk.”



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

GRAHA BNPB - Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur



+6221 - 2982 7793



+6221 - 2128 1200



contact@bnpb.go.id



Ppid@bnpb.go.id



www.bnpb.go.id



+62812 - 955 900 90



BNPB Indonesia



@BNPB_Indonesia



BNPB Indonesia



BNPB Indonesia



Infobencana BNPB



@Infobnpb

BNPBTV

bnpbindonesia.tv



+62812 - 123 75 75